



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Rangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 tercantum Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu **TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS**". guna pencapaian kinerja dari instansi Pemerintah maka dapat kami susun Rncna Kerja Tahun Anggaran 2019 dimana telah disusun pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Rencana Kerja yang didisain melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD dan dimana sebelumnya telah terdapat pada Dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2016 – 2021.

Adapun muatan dalam Renja 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebgaimana yang tertuang dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan telah di Rubah dengan permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka Menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah, adalah :

1. Pendahuluan
2. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
3. Tujuan, sasaran;
4. Program dan kegiatan memuat:
  - indikator kinerja;
  - kelompok sasaran;
  - lokasi kegiatan;
  - kebutuhan dana indikatif; dan



5. sumber dana
6. Penutup

## **1.2 Landasan Hukum**

Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020 disusun dengan mempedomani :

1. Undang – undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor : 42867
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. UU Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Republik indonesia Tahun 2005 Nomor : 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 45487);
4. PP Nomor : 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencanana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor:38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Rencana Pemerintah Tahun 2011
7. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang telah dirubah dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah



- daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka Menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2013
  11. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025
  13. Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor:2 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Maksud dibuatnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 ini adalah untuk:

- a. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran,kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan secara sistematis,komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar

#### **Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja Tahun 2019 adalah untuk memberikan informai setelah Rancangan awal Renja Tahun 2019 dalam penyusunan RKPD. Kabupaten Tanjung Jabung Barat bidang Kebangsaan dan Politik selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di sektor Pemerintahan umum dan Ketertiban Umum.

### **1.4 Sistematika**

Sistematika Penulisan Renja Badan Kesbangpol + disusun sebagai berikut :



## **BAB. I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018
- 2.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB. III TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Sasaran dan Indikator SKPD
- 3.4 Program dan dan Kegiatan

## **BAB. IV PENUTUP**

LAMPIRAN – LAMPIRAN

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**

**Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat**



Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2018 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Program pengembangan Wawasan Kebangsaan.
8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
9. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2018 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kab. Tanjab Barat. Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sampai dengan Triwulan ke IV tahun 2018 sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2017 dan DPA-APBD-2018 adalah



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



**Tabel 1  
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESBANGPOL S/D 2018**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2018) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018 (%)		unit Perangkat daerah yang bertanggung Jawab		
									I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi kegiatan orang asing, Lsm asing (NGO) dan lembaga asing di daerah	13 Kecamatan	65	412,575,000	26	113,121,000	13	52,625,000	0	0	25%	25,625,000	43.75	44,225,000	100	51,250,000	0	0	26	113,121,000	40.00%	27%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



2	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Keamanan dan kenyamanan lingkungan Penanganan konflik sosial	13 Kecamatan	65	654,000,000	26	85,442,500	13	6,975,000	8%	900,000	8%	900,000	8%	900,000	100	6,975,000	8%	900,000	34%	86,342,500	40.12%	13%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) Komunitas inteligen daerah ( KOMINDA )	13 Kecamatan	65	720,000,000	26	242,220,250	13	81,975,000	0	0	26%	31,875,000	41.25	54,750,000	100	80,225,000	26%	31,875,000	26	274,095,250	40%	38	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) Forum kewaspadaan dini masyarakat ( FKDM )	3 Kecamatan	15	625,000,000	6	5,754,040	3	77,925,000	0	0	26.67	29,500,000	46.67	51,175,000	100	76,525,000	26	29,500,000	32	215,254,040	213%	34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	50 Org	200	180,000,000	0	0	50	41,281,400	0	0	0	0	100	40,031,400	100	94,391,400	0	0	0	0	0%	0.00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) Fasilitasi Pembentukan BNN Kab.Tanjung Barat	6 Buku Laporan	30	0	18	0	6	85,915,000	0	0	0	0	31.11	29,055,000	31.11	29,055,000	31.11	29,055,000	49	29,055,000	164%	#DIV/0!	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



7	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	45	225	718,000,000	90	220,026,700	45	107,878,690	13%	20,850,000	25%	51,725,000	88	87,228,690	100	07,878,690	25%	51,725,000	90.25	271,751,700	40%	38	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Forum Diskusi Nilai-nilai sejarah kebangsaan	50	250	296,190,000	100	220,026,700	50	33,325,000	0	0	100	0	100	0	100	33,325,000	100	0	200	220,026,700	80%	74	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
9	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)	50 Org	250	881,630,000	100	142,382,500	50	32,945,000	10,00	12,900,000	22.5	45,700,000	82.5	100,850,000	100	59,010,000	22.5	45,700,000	12250%	188,082,500	49%	21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bimtek Bela Negara	40 Org	200	400,000,000	80	0	40	32,945,000	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	8000%	0	40%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
11	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Pendidikan Politik Masyarakat Pembinaan Pendidikan Politik Masyarakat	40	200	376,000,000	80	134,618,710	40	30,173,240	0	0	50	13,800,000	100	28,373,240	100	59,514,720	50	13,800,000	13000%	148,418,710	65%	39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



12	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Pendidikan Politik Masyarakat Pemantauan Perkembangan Politik Daerah	8 Dokumen	40	347,000,000	16	189,338,550	8	56,475,000	10	14,250,000	25	35,625,000	40	57,000,000	100	76,016,000	25	35,625,000	41	224,963,550	103%	65	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
13	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Pendidikan Politik Masyarakat Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	50	250	548,000,000	100	92,742,850	50	56,475,000	5	5,525,000	20	22,100,000	47.5	39,075,000	100	56,475,000	20	22,100,000	120	114,842,850	48%	21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
14	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Pendidikan Politik Masyarakat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Parpol	33	165	336,000,000	66	129,793,370	33	51,939,170	11.11	8,650,000	27.78	21,625,000	91.44	45,934,170	100	74,966,707	27.78	21,625,000	94	151,418,370	57%	45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
15	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Pendidikan Politik Masyarakat Pemantapan Persiapan Pemilu di Kecamatan	13	65	700,000,000	26	0	13	155,828,380	8.33	6,625,000	46	61,181,040	86	136,637,020	100	55,667,260	46	61,181,040	72	61,181,040	1	9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Pendidikan Politik Masyarakat Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu	4	20	855,000,000	8	0	4	88,005,000	5.55	8,850,000	5.55	8,850,000	39	61,950,000	100	87,825,000	5.55	8,850,000	13.55	8,850,000	0.6775	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Dari data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat yang di akomodir dalam DPA murni dan setelah adanya DPA perubahan telah mencapai hasil kinerja ..... %. Sedangkan Prosentase realisasi keuangan sebesar Rp. 95,23 % Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini masih terdapat realisasi program dari Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat yang belum/tidak mencapai 90% dikarenakan adanya pengurangan anggaran dan lamanya proses APBD-P, proses perubahan Anggaran dan adanya pengurangan anggaran setelah terjadinya Defisit Anggaran mengakibatkan keterlambatannya pengesahan perubahan dokumen pelaksana anggaran Perubahan (DPA- Perubahan )
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi terhadap sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat.
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran



untuk rencana program/Kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut.

Adapun capaian Renstra Tahun yang berlalu adalah :

1. Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan capaian program/kegiatan merupakan tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor dan kesejahteraan pegawai
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasana aparatur dengan output kegiatan memenuhi kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana aparatur dalam meningkatkan kinerja pegawai.
3. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai capaian program/kegiatan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam berpakaian.
4. Terwujudnya sumber daya manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat pendidikan dan latihan untuk meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya
5. Tertatanya sistem Pelaporan dan keuangan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan, realisasi program Kesbangpol. Dengan output pembuatan laporan, prognosis, usulan program, evaluasi kegiatan, perhimpunan peraturan perUndang-undangan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2018 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kab. Tanjab Barat. Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sampai dengan Triwulan ke IV tahun 2018 sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2017 dan DPA-APBD-2018 adalah sebagaimana tabel berikut :



## **2.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019**

Adapun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019 adalah :

### **1. Program pelayanan administrasi perkantoran**

Adapun kegiatan – kegiatan dalam program ini antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

### **2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

Adapun kegiatan – kegiatan dalam program ini antara lain :

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

### **4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**

Adapun kegiatan – kegiatan dalam program ini antara lain :

- a. Koordinasi kegiatan orang asing LSM (NGO) dan lembaga Asing di Daerah



- b. Penanganan Konflik Sosial/PKS
- 5. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
  - a. Komonitas Inteligen Daerah (Kominda)
  - b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
  - c. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- 6. Program pengembangan wawasan kebangsaan
  - a. Bintek Bela Negara
  - b. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan Beragama
  - c. Forum Diskusi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan
  - d. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
- 7. Program Pendidikan Politik Masyarakat
  - a. Pembinaan Pendidikan Politik Masyarakat.
  - b. Pemantauan Perkembangan Politik Daerah
  - c. Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangann Parpol
  - d. Pemantapan Persiapan Pemilu di Kecamatan
  - e. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu
  - f. Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat.

**Tabel 2**  
**Target Program dan Kegiatan Renja 2019**  
**Dan Perkiraan Realisasi Capaian Target**  
**Renstra s/d Tahun 2019**



### 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas – tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing – masing unit Kerja (Bidang)

Berdasarkan struktur organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi masing masing Bidang tersebut dari Sekretaris, BIDANG BINA IDEOLOGI WASBANG, BIDANG BINPOLMAS, BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA.

Adapun rincian tugas dari masing – masing unit kerja (bidang) adalah sebagai berikut:

#### 1) SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok sebahagian tugas Kepala Badan di Bidang Kesekretariatan sebagai berikut :

- a. Membantu menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	92%	250.000.000	92%	250.000.000		
3.01.01.20	pengembangan wawasan kebangsaan	Tingkat kesadaran dalam beragama, berbangsa dan bernegara	%	93%	815.000.000	93%	815.000.000		
1.01.05.17	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Tersedianya data Kominda yang valid dan up to Date	%	100	895.000.000	100	895.000.000		
3.01.01.20	pendidikan politik masyarakat	Tingkat pelaksanaan politik yang jujur, aman dan terkendali	%	94%	1.280.000.000	94%	1.280.000.000		



kinerja badan.

- b. Menyusun Statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan Tugas.
- c. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan urusan Administrasi Keuangan.
- e. Melaksanakan urusan Rumah Tangga, Administrasi, Tata Usaha dan Kearsipan.
- f. Mengoordinasikan Pelaksanaan dan kegiatan bidang – bidang di lingkup Badan.
- g. Melaksanakan Tugas Dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Masing – masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup umum dan kepegawaian sebagai berikut :
  - a. Menyusun bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
  - b. Mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah badan, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumah tanggaan badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.
  - c. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.



- d. Melaporkan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian, dan
- e. Melaksanakan Tugas Dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaannya.
2. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup keuangan.
  - a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja lingkup keuangan.
  - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran.
  - c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, pengelolaan pengendalian keuangan, dan menyusun laporan keuangan badan.
  - d. Menyiapkan laporan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, dan
  - e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.
3. Sub bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian sekretaris lingkup perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dari bidang – bidang badan.
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program badan.
  - c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional badan.
  - d. Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan penilaian pengukuran kinerja Badan.
  - e. Menyiapkan bahan – bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan.





- f. Menyiapkan bahan – bahan penyusunan Laporan Pembangunan Daerah ( LAPEM) badan.
- g. Menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) badan, dan
- h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

**2). KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL**

Kepala Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala badan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.

- a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesabangpol dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasn orang asing dan lembaga
- b. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesabangpol ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
- c. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umu nasional) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasn orang asing dan lembaga
- d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umu nasional) ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
- e. Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi) kewaspadaan dini,



- kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik soasil, pengawasan orang asing dan lembaga
- f. Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
  - g. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik soasil, pengawasan orang asing dan lembaga asing
  - h. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
  - i. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang kewaspadaan nasional, ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - j. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan naskah dinas dibidang tugasnya;
  - k. Mengumpulkan dan mengelola data di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - l. Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas aparatur di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga,



- ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
- m. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
  - n. Melakukan pembinaan Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.;
  - o. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
  - p. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
  - q. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya.

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional membawahi :

- a. Sub bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan



- b. Sub bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik  
Masing – masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
1. Sub Bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian Kepala Bidang lingkup Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai berikut :
  - a. Fasiltasi dan Peningkatan Kapasitas aparatur di Bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
  - b. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
  - c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
  - d. Pengawasan penyelenggaran pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
  - e. Menyiapkan dan mengelola data di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
  - f. Menyusun rencana kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
  - g. Menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi dalam penyusunan laporan kegiatan Sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.



- h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya.
2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai berikut :
  - a. Fasiltasi dan Peningkatan Kapasitas aparatur di Bidang kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga,
  - b. Pelaksanaan dan fasilitasi di bidang Bidang kewaspdaan dini,kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga,
  - c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga,
  - d. Pengawasan penyelenggaran pemerintahan di bidang kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga,
  - e. Menyiapkan dan mengelola data kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja,



- penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dalam penyusunan laporan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

### **3). KEPALA BIDANG PEMBINAAN POLITIK**

Kepala Bidang Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala badan dibidang Pembinaan Politik, pendidikan politik, budaya politik dan Fasilitasi pemilu :

- a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
- b. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada.
- c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;



- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang Politik, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
- e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
- f. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang pembinaan politik dan masyarakat.
- g. Melaksanakan kegiatan pembinaan politik dan masyarakat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dibidang pemeliharaan stabilitas politik dan pengembangan demokrasi.
- h. Melakukan stabilitas hubungan antara lembaga dengan DPRD.
- i. Mengkoordinasikan pemilihan umum Pilpres dan Pilkada.
- j. Melakukan pendataan, monitoring, evaluasi dan pembinaan di bidang pemilu serta penyusunan laporan kegiatan di sub bidang pembinaan politik.
- k. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar kepala bidang, dan
- l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Kepala Bidang Pembinaan Politik membawahi :

- a. Sub bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik
- b. Sub bidang Kelembagaan dan Fasilitasi Pemilu

Masing – masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub bBidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Politik.



1. Sub implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang Pembinaan Politik sebagai berikut :
  - a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;
  - b. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik.
  - c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;
  - d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang Politik, sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;
  - e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan;
  - f. Menyusun rencana dan program kerja lingkup implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik.
  - g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.
2. Sub Bidang Kelembagaan dan Fasilitasi Pemilu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut :
  - a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;





- b. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
- c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
- e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
- f. Menyusun rencana dan program kerja lingkup subbidang Kelembagaan dan fasilitasi pemilu.
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

**4). KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI**

Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala Badan dibidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi :

- a. Fasilitasi dan ghhhpelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan .



- b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
- c. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan .
- d. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan .
- e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
- f. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebijaksanaan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan ,infestasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi , kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .
- g. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian ,pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan



ketahanan lembaga usaha ekonomi ,kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .

- h. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam ,ketahanan perdagangan ,Investasi,fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi ,kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .
- i. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam ,perdagangan,lembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
- j. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Bidang Ketahanan Seni Budaya,Agama,Kemasyarakatan, dan Ekonomi membawahi :

- a. Sub bidang Ketahanan Seni dan Budaya
- b. Sub bidang Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi

Masing – masing sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup Ketahanan Seni Budaya Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi :
  - a. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya.
  - b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan



- evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya.
- c. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya.
  - d. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya.
  - e. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang Ketahanan seni budaya.
  - f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.
2. Sub Bidang Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi:
- a. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
  - b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
  - c. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan .
  - d. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan



- e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional ) dibidang ketahanan sumber daya alam , ketahanan perdagangan , investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat , kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi , kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
- f. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebijaksanaan dan ketahanan sumber daya alam , ketahanan perdagangan, infestasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat ,kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .
- g. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam ,ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .
- h. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, Investasi, fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .
- i. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, perdagangan, lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
- j. penyusunan laporan kegiatan di sub bidang Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan ekonomi.

- k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2018 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kab. Tanjab Barat. Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sampai dengan Triwulan ke IV tahun 2018 sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2017 dan DPA-APBD-2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3  
Jumlah Anggaran dan Persentase Realisasi  
Anggaran Perprogram PerKegiatan  
Tahun Anggaran 2018

No	PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI		
		JUMLAH	PROPORSI %	KEUANGAN		FISIK
				JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Aadministrasi Perkantoran</b>	<b>786.847.666</b>	<b>31.63%</b>	<b>769.577.265</b>	<b>97,88</b>	<b>98,96</b>
1.1.	Penyediaan Surat menyurat	2.250.000	0.09%	2.250.000	100	100
1.2.	Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	77.500.000	3.12%	60.307.234	77,82	89,58
1.3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	70.500.000	2.83%	77.500.000	100	100
1.4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.695.601	0.43%	10.695.601	100	100
1.5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.327.950	1.14%	28.327.950	100	100
1.6.	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	9.222.000	0.37%	9.222.000	100	100
1.7.	Penyediaan Komponen Listrik	2.722.115	0.11%	2.722.115	100	100



# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



	Instalasi/penerangan bangunan Kantor					
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prundang-undangan	4.200.000	0.17%	4.200.000	100	100
1.9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.200.000	0.17%	4.200.000	100	100
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	577.230.000	23.21%	577.152.365	99,99	100
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur</b>	<b>334.540.000</b>	<b>13.45%</b>	<b>303.630.325</b>	<b>90.76%</b>	<b>78,47</b>
2.1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	20.000.000	0.80%	20.000.000	0	0
2.2.	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	11.000.000	0.44%	10.920.000	99.27	100
2.3	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	180.740.000	7.27%	180.466.000	99,85	100
2.4	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	116.000.000	4.68%	105.964.325	90,96	92,35
2.5	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	6.300.000	0.25%	6.300.000	99.68	100
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>15.750.000</b>	<b>0.63%</b>	<b>15.750.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	15.750.000	0.63%	15.750.000	100	100
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>97.835,000</b>	<b>3.93%</b>	<b>97.835,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	40.337.500	1.62%	40.337.500	100	100
4.2.	Penyusunan LKPJ dan LPPD. Badan Kesbangpol	27.087.500	1.09%	27.087.500	100	100
4.3.	Penyusunan Aset (BMD) OPD Kesbangpol	30.410.000	1.22%	30.410.000	100	100
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>59.600.000</b>	<b>2.40%</b>	<b>58.225.000</b>	<b>97,69</b>	<b>100</b>
5.1.	Koordinasi Kegiatan orang Asing, LSM, Asing(NGO) dan lembaga asing di Daerah	51.250.000	2.12%	51.250.000	97,39	100
5.2.	Penanganan Konflik Sosial	6.975.000	0.28%	6.975.000	100	100



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	<b>343.956.400</b>	<b>13.83%</b>	<b>280.196.100</b>	<b>81.46%</b>	<b>82,78</b>
6.1	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	77.925.000	3.13%	76.525.000	98,20	100
6.2.	Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)	81.975.000	3.30%	80.225.000	97,87	100
6.3	Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba	98.141.400	3.95%	94.391.400	96.18	100
6.4	Fasilitasi Pembentukan BNN.Kabupaten Tanjung Jabung Barat	85.915.000	3.45%	29.055.000	33,82	31.11
<b>7.</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>334.158.690</b>	<b>13.43%</b>	<b>333.109.930</b>	<b>99.69%</b>	<b>100</b>
7.1.	Bintek Bela Negara	32.945.000	1.32%	32.896.240	99.85	100
7.2.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	107.878.690	4.34%	107.878.690	100	100
7.3	Forum Diskusi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan	.33.325000	1.34%	33.325000	100	100
7.4.	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	160.010.000	6.43%	159.010.000	99,38	100
<b>8.</b>	<b>Program Pendidikan Masyarakat</b>	<b>514.750.807</b>	<b>20.69%</b>	<b>510.464.687</b>	<b>99,17</b>	<b>100</b>
8.1.	Pembinaan Pendidikan Politik Masyarakat	61.664.720	2.48%	59.514.720	96,51	100
8.2.	Pemantauan Perkembangan Politik Daerah	76.911.000	3.09%	76.016.000	98.84	100
8.3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Parpol	75.866.707	3.05%	74.966.707	98.81	100
8.4.	Pemantapan Persiapan Pemilu di Kecamatan	155.828.380	6.26%	155.667.260	99.90	100
8.5.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu	88.005.000	3.54%	87.825.000	99.80	100
8.6.	Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	55.475.000	2.27%	56.475.000	100	100
<b>Jumlah 2018</b>		<b>2,487,438,563</b>	<b>100 %</b>	<b>2.368.788.607</b>	<b>95,23</b>	<b>94,66</b>
<b>Jumlah 2017</b>		<b>1.487.633.863</b>		<b>1.422.731.394</b>	<b>95,64</b>	<b>95,20</b>

#### 2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berkaitan dengan dokumen perencanaan Badan Kesbang Pol Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disusun dokumen perencanaan Badan sebagai berikut :





1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD ) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun ke depan yaitu tahun 2016-2021
2. Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memiliki jangka waktu 1 Tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD.

Dengan demikian dalam perencanaan harus memuat isu-isu tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Berdasarkan tugas dan fungsipelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan dan mengembangkan tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana mestinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi situasi keadaan dan peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi percepatan tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Organisasi.

## **2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dari rancangan Renja yang telah disusun Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan Tahunan. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat disamping itu dokumen rencana kerja memuat informasi tentang program kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang

dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

## **2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.

Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri No.59 Tahun 2007

Kegiatan Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja.

Berdasarkan usulan masyarakat dan kelompok pada Forum OPD maka beberapa kegiatan yang mengalami perubahan dari Rancangan awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adapun kegiatan kegiatan tersebut adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5  
Hasi Telaahan Masyarakat yang disulkan kedalam Program dan Kegiatan dalam Rancangan Renja 2020

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-



### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pokok-pokok Kebijakan program nasional yang terkait dengan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi arah kebijakan daerah.

Beberapa Pokok-pokok Kebijakan program nasional Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai dengan tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

1. Arah Kebijakan dalam mewujudkan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa dan berbudaya;
  - b. Mantapnya kehidupan beragama, berbangsa dan berbudaya yang tercermin dalam kehidupan masyarakat;
  - c. Menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan berbudaya;
  - d. Mempertahankan kerukunan antar umat beragama dan menjaga serta mempertahankan keragaman budaya daerah.
  
2. Arah Kebijakan Politik dan Kwaspadaan Nasional;
  - a. Peningkatan kualitas pemberian informasi dalam pemahaman terhadap Politik dan Kwaspadaan Nasional dalam masyarakat;
  - b. Mengembangkan penyelenggaraan mediasi dan failitasi Politik dan Kwaspadaan Nasional;
  - c. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan pembinaan Politik dan Kwaspadaan Nasional;
  - d. Pembukuan dalam sebuah dokumen Data Base Parpol.



### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

#### A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusunnya Visi dan Misi tersebut adalah guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing – masing misi.

Dalam upaya menunjukkan Visi kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 yaitu ”TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS”.

Penjabaran dari Misi Kepala Daerah terpilih pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**MAJU** : berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.

**ADIL** : berarti kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

**MAKMUR** : berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.



**BERMARTABAT** : berarti suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.

**BERKUALITAS** : berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkupan hidup.

Untuk mencapai Visi yang dimaksud di atas maka harus di jalankan beberapa Misi, adapun Misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### MISI KEPALA DAERAH

Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai Visi Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung rencana kerja Pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2016-2021 sebagaimana tersirat dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat



menetapkan Visi Misi nya sesuai dengan maksud dan tujuan Visi Misi Kepala Daerah terpilih . Adapun Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN MENUJU MASYARAKAT MADANI”**

Untuk mewujudkan Visi Badan Kesatuan Bangsa,dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka ditetapkanlah Misi. Dimana Misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada dan apa yang dilakukannya serta bagaimana melakukannya. Adapun Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem kerja yang profesional yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas;
2. Mewujudkan iklim kehidupan diwilayah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang ditopang oleh mantapnya wawasan kebangsaan, integritas dan ketahanan bangsa di daerah;
3. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat guna mengembangkan budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan lembaga infrastruktur politik;
4. menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar berperan serta dalam mengantisipasi, mencegah, menyelamatkan serta merehabilitasi kerusakan dan kerugian akibat bencana;
5. Mewujudkan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

**1. Perencanaan pembangunan yang berkualitas**

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah proses perencanaan yang transparan yaitu proses perencanaan dilaksanakan



menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan dan aspirasi masyarakat konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak yaitu dalam melaksanakan proses dilakukan dengan terukur secara kuantitas atau kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

Tujuan yang Akan dicapai berdasarkan tujuan RPJMD adalah tujuan ke satu RPJMD 2016-2021 yaitu : **MENINGKATKATNYA KUALITAS TATANAN MASYARAKAT DALAM BERAGAMA DAN BERBUDAYAN**

## **B. SASARAN**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima tahun dan dilaksanakan secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan sasaran yang ditetapkan harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur.

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sasaran ke satu pada RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**MENINGKATKATNYA PARTISIFASI AKTIF MASYARAKAT DALAM TATANAN MASYARAKAT YANG BERAGAMA DAN BERBUDAYA**

Dengan demokian maka Badan Kesbangpol menyusun Pohon Kinerja untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2019, adapapun uraian dari pohon kinerja yang dimaksud adalah

### **SASARAN 1**

Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antarsuku agama dan golongan Dengan Indikator Sasaran :

1. Perosentase penurunan konflik social
2. Perosentase penurunan aksi unjuk rasa



#### SASARAN 2

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan Bela Negara

Dengan Indikator:

1. Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan / perkembangan kelompok radikal
2. Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan / perkembangan kasus yang berlatar belakang suku ras dan antar golongan

#### SASARAN 3

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial serta pemberdayaan Ormas guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kodusif

Dengan Indikator:

1. Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan konflik terkait kerukunan antar umat beragama
2. Persentase Ormas yang berperan secara aktif dalam pembangunan

#### SASARAN 4

Meningkatkan demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat

Dengan Indikator:

1. Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu:
  - Pilpres 2019
  - Pileg Provinsi dan Kabupaten
  - Pileg DPD
2. Persentase penurunan sengketa pemilu
3. Indeks Demokrasi Indonesia (Tanjaabbar)

#### SASARAN 5

Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja dan Keuangan

Dengan Indikator:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Nilai AKIP





Melihat dari sasaran-sasaran tersebut di atas dapat dipahami bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi dengan capaian program/kegiatan merupakan tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor, kesejahteraan pegawai
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan output kegiatan memenuhi kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana aparatur dalam meningkatkan kinerja pegawai.
3. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai capaian program/kegiatan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam berpakaian.
4. Terwujudnya sumber daya manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat pendidikan dan latihan untuk meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan.
5. Tertatanya sistem Pelaporan dan keuangan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program Kesbang dan Politik. Dengan output pembulatan laporan, prognosis, usulan program, evaluasi kegiatan, perhimpunan peraturan perUndang-undangan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan lembaga asing. Dengan output rapat koordinasi pembinaan terhadap Lembaga Asing, Orang Asing yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pengusaha Asing, dan Tenaga Kerja Asing.
  - b. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat dengan output kegiatan rapat koordinasi forum kerukunan umat beragama yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat



- c. Pembinaan dan Pemantapan Eksistensi Kominda di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan output Rapat Koordinasi dan deteksi dini tentang Komindadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang melibatkan kalangan Intelijen dan Aparatur Pemerintah.
  - d. Pembinaan dan Pemantauan aparatur Penanganan konflik dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dengan output kegiatan pemantauan dan pembinaan diwilayah ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penanganan konflik yang terjadi di daerah dengan melibatkan aparatur dan masyarakat serta pihak – pihak yang berkepentingan
  - e. Kerjasama pengembangan kemampuan organisasi politik, kemasyarakatan dan lembaga keagamaan dengan Pemerintah. Dengan capaian kegiatan agar terbinanya kerjasama yang baik antara organisasi politik, Ormas Lembaga Keagamaan serta aparatur Pemerintah.
  - f. Peningkatan/pembinaan kapasitas/kualitas organisasi politik dan kemasyarakatan.
  - g. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan dengan output kegiatan memantau, evaluasi berbagai Ormas dan LSM yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dengan capaian kegiatan terlaksananya rasa solidaritas dan ketahanan berbangsa dan meningkatkan rasa persatuan berbangsa di kalangan masyarakat.
  - b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai – nilai luhur budaya masyarakat dengan indikator kinerja mensosialisasikan rasa cinta tanah air akan budaya dengan melibatkan aparatur dan masyarakat.



- c. Dialog generasi muda dengan Palaku Sejarah dengan menanamkan jiwa patriotisme di kalangan generasi muda, Pelajar dan Mahasiswa dengan mengenalkan para pelaku sejarah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  - d. Penataran Ketahanan Bangsa dengan output kegiatan memberikan penataran ke berbagai kalangan Mahasiswa, Pelajar, Dharma Wanita, aparatur dalam mempertahankan, menjaga keutuhan dan cinta tanah air.
  - e. Fasilitasi hubungan antar lembaga keagamaan dan pendidikan dengan Pemerintah dalam perannya sebagai agen perubahan.
  - f. Monitoring dan evaluasi aktivitas perkembangan kelembagaan, yayasan keagamaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan output kegiatan rapat internal antar Pemda dan lembaga keagamaan, mengevaluasi keberadaan eksistensi yayasan keagamaan.
8. Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan output kegiatan sosialisasi dan koordinasi tentang Halaqoh dan forum keagamaan.
  - b. Peningkatan kesadaran bela Negara dengan output terciptanya rasa patriotisme yang tinggi dari masyarakat.
  - c. Orientasi Pembauran bagi Pramuka dan pelajar dengan output kegiatan sosialisasi, pelatihan tenaga terlatih dalam forum Pembauran Kebangsaan di Kalangan Pelajar di daerah.
  - d. Pentas Seni dan budaya, Festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan mengadakan festival untuk menumbuh kembangkan budaya bangsa.
9. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan rincian kegiatan :



- a. Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan bencana ( Permendagri No.12 Tahun 2006 ) dengan output terwujudnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintah di bidang kewaspadaan dini.
10. Terlaksannya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dengan kegiatan :
  - a. Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan bersama SKB No.9/8 Tahun 2006. Dengan output Rapat koordinasi Peraturan bersama dengan outcomenya terlaksananya pendataan dan pelaporan permasalahan pelaksanaan peraturan bersama Mendagri dan Menag.
11. Peningkatan Politik Masyarakat dengan rincian kegiatan :
  - a. Kkoordinasi forum – forum diskusi politik dengan output terselenggaranya rapar koordinasi forum dengan melibatkan legislatife, Aparatur, KPU dan Panwaslu, TNI/Polri, Perguruan Tinggi dan Swasta.
  - b. Penyusunan Database Partai Politik (Parpol/Ormas/OKP/LSM & Keagamaan ) dengan terbentuknya tim penyusunan Database (Parpol/Ormas/OKP/LSM dan Kelembagaan perwakilan.
  - c. Monitoring dan evaluasi Parpol, Ormas. OKP dan Lembaga Keagamaan/Perwakilan dengan output kegiatan terfasilitasinya usulan 15 ormas LSM baik perpanjangan pusat Provinsi untuk diikutsertakan dalam kerjasama kemitraan dalam rangka menunjang program kegiatan Dirjen kesbang Pol Kemendagri.
  - d. Sosialisasi pemahaman budaya politik di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan output kegiatan terkembangnya upaya – upaya pelestarian budaya daerah/adat daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  - e. Monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan kelestarian budaya bangsa (Permendagri No.39 Tahun 2007) dengan output



- terpantaunya pembinaan pelestarian budaya bangsa di kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- f. Pemasarakatan Undang – undang Politik dengan output kegiatan mensosialisasikan undang – undang politik ke Aparatur Pemerintah dan masyarakat.
  - g. Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dengan output kegiatan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pelaksanaan politik di daerah.
12. Terlaksananya Demokrasi yang makin kokoh dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan kualitas proses politik dengan output kegiatan meningkatnya kualitas proses politik bagi lembaga Parpol di daerah.
  - b. Fasilitasi Pemilu Presiden , Legislatif dan Pemilukada serta pengembangan kualitas proses politik dengan output kegiatan terselenggaranya rapat koordinasi antar parpol, Panwaslu, KPU, Ormas, BEM, Legislatif terhadap pelaksanaan Pemilukada Bupati Tanjung Jabung Barat dan Wakil Bupi Tanjung Jabung Barat.
  - c. Peningkatan kapasitas kader Parpol dengan output kegiatan meningkatkannya pengembangan pembinaan kader parpol.
  - d. Peningkatan sosialisasi komunikasi / diskusi politik tentang kebijakan pemerintah dalam tugas dan fungsi wakil rakyat di lembag perwakilan dengan output kegiatan forum diskusi tentang pemanjtapan pemahaman masyarakat dan lembaga parpol terhadap situasi politik dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.



Adapun sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan tersebut di atas adalah sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra, yaitu:

Tabel  
TUJUAN,SASARAN,  
INDIKATOR,DAN TARGET

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Targrt	
				2020	2021
1	Meningkatnya kualitas tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya	<u>SASARAN 1</u> Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kwalitas kehidupan sosial masyarakat baik antarsuku agama dan golongan	<u>INDIKATOR SASARAN 1</u>  1. Perosentase penurunan konflik social  2. Perosentase penurunan aksi unjuk rasa		
2		<u>SASARAN 2</u> Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap idiologi bangsa, wawasan kebangsaan dan Bela Negara	<u>INDIKATOR SASARAN 2</u>  1. Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan / perkembangan kelompok radikal. 2. Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan / perkembangan kasus yang berlatar belakang suku ras dan antar golongan		



3		<p><u>SASARAN 3</u></p> <p>Meningkatnya kualitas kehidupan sosial serta pemberdayaan Ormas guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kodusif</p>	<p><u>INDIKATOR SASARAN 3</u></p> <p>1. Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan konflik terkait kerukunan antar umat beragama</p> <p>2. Persentase Ormas yang berperan secara aktif dalam pembangunan</p>		
4		<p><u>SASARAN 4</u></p> <p>Meningkatkan demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat</p>	<p>1. Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu: - Pilpres 2019 - Pileg Provinsi dan Kabupaten - Pil DPD.</p> <p>2. Persentase penurunan sengketa Pemilu.</p> <p>3. Indeks Demokrasi Indonesia (Tanjaabbar)</p>		



5		<u>SASARAN 5</u> Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja dan Keuangan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2 Nilai AKIP		
---	--	---	---	--	--

### 3.4 Program dan Kegiatan Tahun 2019

Rancangan Awal Renja 2019

Program :

Adapun Program dan Kegiatan Badan Kesatuab Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019 berdasarkan Dokumen Renstra 2016 - 2021 adalah sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
9. Program Pendidikan Politik Masyarakat

**Kegiatan :**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa kegiatan yang terdiri dari:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;





3. Penyediaan Jasa administrasi keuangan;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
11. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua
12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14. Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
17. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
18. Pengadaan Bangunan Kantor tempat Kerja
19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
20. Pengembangan Sumberdaya Manusia
21. Penyusunan Laporan dan Data Aset Milik Daerah OPD Kesbangpol
22. Koordinasi kegiatan orang asing, LSM.Asing (NGO) dan lembaga Asing di Daerah;
23. Penanganan Konflik Sosial
24. Pembinaan Ummat Beragama rangka menciptakan keharmonisan antar Ummat dan Toleransi Kerukunan dalam kehidupan beragama;
25. Ketahanan seni dan Budaya
26. Forum Diskusi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan
27. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
28. Bimtek Bela Negara
29. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM
30. Orientasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan



31. Komonitas Inteligen Daerah (KOMINDA)
32. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
33. Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba
34. Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol
35. Pembinaan Politik Masyarakat
36. Pemantauan Perkembangan Politik Daerah
37. Pemantapan Persiapan Pemilu Kada Kab/Prov di 13 Kecamatan
38. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu
39. Forum Diskusi Politik

Setelah melalui proses perencanaan sebagaimana peraturan yang berlaku maka setelah di review recana awal Program dan Kegiatan Tersebut menjadi :

Recana Kerja Tahun 2019

Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
1. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

**Kegiatan :**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa kegiatan yang terdiri dari:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan Jasa administrasi keuangan;



4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
11. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua
12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14. Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
18. Pengembangan Sumberdaya Manusia
19. Koordinasi kegiatan orang asing, LSM.Asing (NGO) dan lembaga Asing di Daerah;
20. Penanganan Konflik Sosial
21. Pembinaan Ummat Beragama rangka menciptakan keharmonisan antar Ummat dan Toleransi Kerukunan dalam kehidupan beragama;
22. Forum Diskusi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan
23. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
24. Bimtek Bela Negara
25. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM
26. Komonitas Inteligen Daerah (KOMINDA
27. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
28. Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba
29. Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol
30. Pembinaan Politik Masyarakat
31. Pemantauan Perkembangan Politik Daerah
32. Pemantapan Persiapan Pemilu Kada Kab/Prov di 13 Kecamatan



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



33. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu
34. Forum Diskusi Politik



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



**Tabel .6  
RENSTRA PERUBAHAN  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator: Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	SASARAN 1 Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta kualitas kehidupan sosial masyarakat agar agama dan adat istiadat terjaga		PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT /PEKAT	Indikator Sasaran 1 1. Persentase penurunan konflik sosial 2. Persentase penurunan aksi unjuk rasa	100%	90%	85,000,000	92%	145,000,000	93%	195,000,000	94%	220,000,000	95%	220,000,000	96%	231,000,000	100%	1,096,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat			
Indikator Sasaran Program 1 - Persentase realisasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan konflik sosial. - Persentase Desa / Kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan peningkatan konflik sosial. - Jumlah Kecamatan yang termonitor keberadaan kegiatan orang asing di daerah. - Persentase cegah dini dan advokasi Rencana Aksi unjuk Rasa																								
Indikator Kinerja Kegiatan - Persentase pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu penanganan konflik yang disampaikan tepat waktu. - Persentase penurunan konflik sosial yang terjadi - Jumlah unjuk Rasa yang terkendali. Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pencegahan dan penyalahgunaan Napza. - Persentase penurunan permasalahan akibat keberadaan Lembaga / orang				100%			100%			100%			100%		100%			100%			100%		KESBANG	Tanjung Jabung Barat



# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



		Asing. '- Persentase lembaga / orang asing yang keberadaannya yang terawasi																	
	Tim Kewaspadaan Dini di Daerah (FKDM)	- Persentase Kinerja Tim Kewaspadaan dini Daerah dalam Temu Cepat Lapor	85%	2 Dokmen	85,000,000	2 Dokmen	100,000,000	2 Dokumen 1 Kampung Pancasila	150,000,000	2 Dokumen 1 Kampung Pancasila	175,000,000	2 Dokumen 1 Kampung Pancasila	175,000,000	183,750,000	2 Dokumen 1 Kampung Pancasila	868,750,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat	
	Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba	Jumlah pelaksanaan serta Peserta Sosialisasi pencegahan dan Penyalahgunaan NAPZA	0.00%	0.00%	0	50 Orang	45,000,000	50 Orang	45,000,000	50 Orang	45,000,000	50 Orang	45,000,000	50 Orang	47,250,000	80%	227,250,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	<b>PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	Indikator Sasaran 1 1. Persentase penurunan konflik sosial 2. Perentase penurunan aksi unjuk rasa	88%	90%	297,130,000	91%	635,000,000	92%	775,000,000	93%	775,000,000	94%	1,025,000,000	95%	1,348,750,000	95%	4,855,880,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
		Indikator Sasaran Program 1 '- Persentase realisasi Rencana Aksi Tim terpadu Penanganan konflik sosial. '- Persentase Desa / Kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan peningkatan konflik sosial. '- Jumlah Kecamatan yang termonitor keberadaan kegiatan orang asing di daerah. '- Persentase cegah dini dan advokasi Rencana Aksi unjuk Rasa																	



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



		<p><b>Indikator Kinerja Kegiatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu penangan konflik yang disampaikan tepat waktu.</li> <li>- Persentase penurunan konflik sosial yang terjadi</li> <li>- Jumlah unjuk Rasa yang terkendali. Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pencegahan dan penyalahgunaan Napza.</li> <li>- Persentase penurunan permasalahan akibat keberadaan Lembaga / orang Asing.</li> <li>- Persentase lembaga / orang asing yang keberadaannya yang terawasi</li> </ul>																		Tanjung Jabung Barat
	Koordinasi Kegiatan Orang Asing LSM Asing dan lembaga asing di Daerah (NGO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penurunan permasalahan akibat keberadaan Lembaga / orang Asing.</li> <li>- Persentase Lembaga / orang asing yang keberadaannya yang terawasi</li> <li>- Persentase Lembaga / orang asing yang keberadaannya yang terawasi</li> </ul>	84,13%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4 Dokumen	100,000,000	4 Dokumen	100,000,000	8 Dokumen	200,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat	
																				Tanjung Jabung Barat
	Penanganan Konflik Sosial (PKS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu penangan konflik yang disampaikan tepat waktu.</li> <li>Persentase penurunan konflik sosial yang terjadi</li> </ul>	80%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	150,000,000	8 Dokumen	300,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat	
																				Tanjung Jabung Barat
																				Tanjung Jabung Barat
<b>SASARAN 2</b> Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideology bangsa, wawasan kebangsaan dan bela	<b>PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<p><b>Indikator Sasaran ke 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan / perkembangan kelompok radikal</li> <li>2.Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan / perkembangan kasus yang berlatar belakang sukuras dan antargolongan</li> </ul>																		Tanjung Jabung Barat



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



negara		<p><b>Indikator Sasaran Program 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan antara Kerukunan Ummat Bergama</li> <li>- Jumlah Ormas yang mendaftarkan keberadaannya ke Badan Kesbangpol TJB.</li> <li>- Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan Ideologi bangsa dan bela Negara.</li> <li>- Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan terhadap tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan tokoh Pemuda sebagai kader pembauran Kebangsaan.</li> </ul> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti sosialisai / Forum Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan</li> <li>- Tingkat pemahaman peserta terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan.</li> <li>- Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti Pemantapan Idiologi Bangsa dan Bela Negara.</li> </ul>																	Tanjung Jabung Barat
	Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan	Tingkat pemahaman peserta terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan.	0.00%	50 Orang	35,000,000	50 Orang	35,000,000	50 Orang	75,000,000.00	50 Orang	75,000,000.00	50 Orang	75,000,000.00	50 Orang	78,750,000	12 Bulan	373,750,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti sosialisai / Forum Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	90%	13 Kecamatan	81,630,000	60 Orang	200,000,000	60 Orang, 1 Percontohan Kampung Pancasila	200,000,000	60 Orang 1 Percontohan Kampung Pancasila	200,000,000	60 Orang 1 Percontohan kampung Pancasila	200,000,000	60 Orang 1 Percontohan kampung Pancasila	200,000,000	300 Orang	1,081,630,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Bimtek Bela Negara	Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti Pemantapan Idiologi bangsa dan bela Negara.	0.00%					40 Orang	100,000,000	40 Orang	100,000,000	40 Orang	100,000,000	160 Orang	400,000,000	280 Orang	700,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
		Tingkat pemahaman Peserta terhadap Idiologi bangsa dan bela negara																	
																			Tanjung Jabung Barat





**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



<p><b>SASARAN 3</b> Meningkatnya kualitas kehidupan sosial serta pemberdayaan Ormas guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kodusif</p>	<p><b>PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b></p>	<p><b>Indikator Sasaran 3</b> 1. Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan konflik terkait Kerukunan umat beragama 2. Persentase Ormas yang berperan secara aktif dalam pembangunan</p>																		Tanjung Jabung Barat	
		<p><b>Indikator Sasaran Program</b> Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan antara Kerukunan Ummat Bergama - Jumlah Ormas yang mendaftarkan keberadaannya ke Badan Kesbangpol TJB. - Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan Ideologi bangsa dan bela Negara. - Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan terhadap tokoh masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda sebagai kader pembauran Kebangsaan</p>																			Tanjung Jabung Barat
		<p><b>Indikator Kinerja Kegiatan</b> - Jumlah Peserta dialog Kerukunan Ummat anatar Beragama - Jumlah Ormas yang mengikuti pembinaan oleh Badan Kesbangpol.</p>																			
	<p>Pembinaan Ummat Beragama dalam rangka menciptakan Keharmonisan antar Ummat dan Toleransi Kerukunan Ummat Beragama (FKUB)</p>	<p>Jumlah Peserta dialog Kerukunan Ummat anatar Beragama</p>	99,38%	12 Bulan	118,000,000	2 Kali Rapat di Kabupaten dan 1 kali rapat di tiap Kecamatan (13 Kecamatan)	150,000,000	2 Kali Rapat di Kabupaten dan 1 kali rapat di tiap Kecamatan (12 Kecamatan) 1 Percontohan Kampung KUB	150,000,000	2 Kali Rapat di Kabupaten dan 1 kali rapat di tiap Kecamatan (12 Kecamatan) 1 Percontohan Kampung KUB	150,000,000	100%	157,500,000	12 Bulan	875,500,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat				
<p>Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM</p>	<p>Jumlah Ormas yang mengikuti pembinaan oleh Badan Kesbangpol.</p>	100%	100 Orang	48,000,000	60 Ormas	125,000,000	60 Ormas	125,000,000	60 Ormas	125,000,000	60 Ormas	131,250,000	12 Bulan	679,250,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat					



# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



<b>SASARAN 4</b> Meningkatkan demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	Orientasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti Pemantapan Ideologi Bangsa dan Bela Negara.	87%	40 Orang	14,500,000	60 Orang	125,000,000	60 Orang	125,000,000	60 Orang	125,000,000	60 Orang	125,000,000	60 Orang	131,250,000	12 Bulan	645,750,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat	
	PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	<b>Indikator Sasaran 4</b> 1.Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu : - Pilpres 2019 - PilegProvinsidanKabupaten - Pileg DPD 2.Persentase penurunan Jumlah sengketa pemilu 3.IndeksDemokrasi Indonesia (Tanjaabbar) <b>Indikator Sasaran Program</b> Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu : - Pilpres - Pileg Pusat, - Pileg Provisi - Pileg Kabupaten - Pileg DPD - Legitimasi (Keabsahan) hasil Pemilu <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b> Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pra dan Pasca Pileg dan Pilpres 2019 di Kab Tanjung Jabung Barat	88%	90%	130,000,000	90%	863,000,000	93%	895,000,000	94%	400,000,000	95%	810,000,000	96%	934,500,000	100%	4,032,500,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat	
			100%	0.00%	0	4 Kali 4 Dokumen	345,000,000	4 Kali 4 Dokumen	345,000,000	4 Kali 4 Dokumen	200,000,000	4 Kali 4 Dokumen	200,000,000	4 Kali 4 Dokumen	210,000,000	4 Kali 4 Dokumen	1,300,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat	
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu	Persentase Golput dalam Pemilu 2019																		Tanjung Jabung Barat
		Jumlah Sengketa dalam Pemilu 2019																		Tanjung Jabung Barat
	Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol	Persentase Parpol yang menyerahkan Pertanggung jawaban bantuan keuangan tepat waktu.	99,58%	12 Bulan	60,000,000	11 Rekomendasi Pencairan	60,000,000	11 Rekomendasi Pencairan	70,000,000	11 Rekomendasi Pencairan	70,000,000	11 Rekomendasi Pencairan	70,000,000	11 Rekomendasi Pencairan	157,500,000	11 Rekomendasi Pencairan	487,500,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat	
Pembinaan Politik asyarakat	Tingkat Pemahaman Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa terhadap Budaya dan etika Politik	98%	75 Orang	70,000,000	40 Orang	31,000,000	40 Orang	40,000,000	40 Orang	40,000,000	80 Orang	100,000,000	80 Orang	105,000,000	40 Orang	386,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat		
Pemantauan Perkembangan Politik Daerah	Jumlah Pemantauan Perkembangan Politik di Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	91,67%	0.00%	0	8 Dokumen Laporan	77,000,000	8 Dokumen Laporan	90,000,000	8 Dokumen Laporan	90,000,000	8 Dokumen Laporan	90,000,000	8 Dokumen Laporan	94,500,000	8 Dokumen Laporan	441,500,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat		



# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



<b>SASARAN 5 Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja dan Keuangan</b>	Pemantapan Persiapan Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020 di 13 Kecamatan	Jumlah Laporan persiapan Pemilu Kada di 13 Kecamatan	100%	0.00%	0	13 Kecamatan	350,000,000	13 Kecamatan	350,000,000	0.00%	0	13 Kecamatan	350,000,000	13 Kecamatan	367,500,000		1,417,500,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat	
		Jumlah Sosialisasi pemantapan Pilkada Provinsi dan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat																		Tanjung Jabung Barat
																				Tanjung Jabung Barat
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	<b>Indikator Sasaran 5</b> 1. IndeksKepuasanMasyarakat 2. Nilai AKIP		100.0%	100.0%	388,400,000	100.0%	613,400,000	100.0%	645,400,000	100%	647,400,000	100%	662,400,000	100%	695,520,000	100%	3,652,520,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
		<b>Indikator Program</b> - Rata- Rata IKM per triwulan - Persentase pemenuhan komponen SAKIP - Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat yang di tindak lanjuti																		Tanjung Jabung Barat
		Indikator Kinerja Kegiatan - Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana Aparatur																		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase peningkatan disiplin, kapasitas sumber daya Aparatur																		Tanjung Jabung Barat
		Tersedianya Materai Rp. 3000, Materai Rp.6000 dan Benda Pos Lainnya		100%	12 Bln	3,000,000	12 Bln	3,000,000	12 Bln	3,000,000	12 Bln	3,000,000	12 Bulan	3,000,000	12 Bulan	3,150,000	12 Bulan	18,150,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komonikasi, Sumer daya air dan Listrik		100%	12 Bln	60,000,000	12 Bln	65,000,000	12 Bln	65,000,000	12 Bln	65,000,000	12 Bln	65,000,000	12 Bln	68,250,000	12 Bulan	388,250,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat dan Peralatan Kebersihan Kantor		100%	12 Bln	8,000,000	12 Bln	11,000,000	12 Bln	11,000,000	12 Bln	11,000,000	12 Bln	11,000,000	12 Bln	11,550,000	12 Bulan	63,550,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		100%	12 Bln	45,000,000	12 Bln	30,000,000	12 Bln	40,000,000	12 Bln	40,000,000	12 Bln	40,000,000	12 Bln	42,000,000	12 Bulan	237,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		100%	12 Bln	11,000,000	12 Bln	15,000,000	12 Bln	15,000,000	12 Bln	17,000,000	12 Bln	17,000,000	12 Bln	17,850,000	12 Bulan	92,850,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat	



# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Penerangan Tempat Kerja;	100%	12 Bln	3,000,000	12 Bln	3,000,000	12 Bln	3,000,000	12 Bln	3,000,000	12 Bln	3,000,000	12 Bln	3,150,000	12 Bulan	18,150,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan media cetak	100%	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,410,000	12 Bulan	25,410,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat	100%	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,410,000	12 Bulan	25,410,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	100%	12 Bln	250,000,000	12 Bln	478,000,000	12 Bln	500,000,000	12 Bln	500,000,000	12 Bln	515,000,000	12 Bln	540,750,000	12 Bulan	2,783,750,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
																			Tanjung Jabung Barat
<b>SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Indikator Sasaran</b> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai AKIP		100%	100%	265,000,000	100%	265,000,000	100%	265,000,000	100%	265,000,000	100%	290,000,000	100%	425,000,000	100%	1,775,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	<b>Indikator Program</b> - Rata- Rata IKM per triwulan - Persentase pemenuhan komponen SAKIP - Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat yang di tindak lanjuti																		Tanjung Jabung Barat
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b> - Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana Aparatur - Persentase peningkatan disiplin, kapasitas sumber daya Aparatur																		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	1 Kali	60,000,000	1 Kali	60,000,000	1 Kali	60,000,000	1 Kali	60,000,000	1 Kali	60,000,000	1 Kali	60,000,000	100%	360,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	1 Kali	50,000,000	1 Kali	50,000,000	1 Kali	50,000,000	1 Kali	50,000,000	1 Kali	50,000,000	1 Kali	50,000,000	100%	300,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Pemeliharaan Rutin Berkala /Gedung Kantor	Perbaikan Atap/Lantai Dinding/Jendela dan pengecatan Gedung Kantor	100%	1 Kali	25,000,000	1 Kali	25,000,000	1 Kali	25,000,000	1 Kali	25,000,000	1 Kali	25,000,000	1 Kali	25,000,000	100%	150,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat



# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan mendapatkan pemeliharaan secara rutin	100%	3 Unit R4 16 Unit R2 1 Unit Gen	120,000,000	3 Unit R4 16 Unit R2 1 Unit Gen	120,000,000	3 Unit R4 16 Unit R2 1 Unit Gen	120,000,000	3 Unit R4 16 Unit R2 1 Unit Gen	120,000,000	3 Unit R4 16 Unit R2 1 Unit Gen	140,000,000	3 Unit R4 16 Unit R2 1 Unit Gen	140,000,000	3 Unit R4 16 Unit R2 1 Unit Gen	760,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat	
	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	6 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Laptop	10,000,000	6 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Laptop	10,000,000	6 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Laptop	10,000,000	6 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Laptop	10,000,000	6 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Laptop	15,000,000	6 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Laptop	150,000,000	6 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Laptop	205,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat	
																			Tanjung Jabung Barat	
	<b>DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Indikator Sasaran</b> 1. IndeksKepuasanMasyarakat 2. Nilai AKIP	100%	100%	17,000,000	100%	17,000,000	100%	17,000,000	100%	17,000,000	100%	17,000,000	100%	17,000,000		102,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat	
		<b>Inikator Kinerja Program</b> - Rata- rata IKM per triwulan - Persentase pemenuha komponen SAKIP - Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat yang di tindak lanjuti																	Tanjung Jabung Barat	
		<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b> - Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana Aparatur - Persentase peningkatan disiplin, kapasitas sumber daya Aparatur																		Tanjung Jabung Barat
		Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas PNS/Non PNS	100%	PNS 32 stel TKS 13 stel	17,000,000	PNS 32 stel TKS 13 stel	17,000,000	PNS 32 stel TKS 13 stel	17,000,000	PNS 32 stel TKS 13 stel	17,000,000	PNS 32 stel TKS 13 stel	17,000,000	PNS 32 stel TKS 13 stel	17,000,000		102,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat	
																			Tanjung Jabung Barat	
	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APRATUR</b>	1. IndeksKepuasanMasyarakat 2. Nilai AKIP	100%	100%	10,000,000	100%	0	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	40,000,000	100%	42,000,000	100%	132,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat	



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



		INDIKATOR KINERJA PROGRAM - Rata- rata IKM per triwulan - Persentase pemenuha komponen SAKIP - Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat yang di tindak lanjuti																	Tanjung Jabung Barat
		<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b> - Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana Aparatur - Persentase peningkatan disiplin, kapasitas sumber daya Aparatur																	Tanjung Jabung Barat
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN ikut Bimtek,Diklat,Sosialisasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		KESBANG	Tanjung Jabung Barat
		Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Diklat/Sosial	100%	2	10,000,000	0	0	4 Orang	20,000,000	4 Orang	20,000,000	4 Orang	40,000,000	8	42,000,000		132,000,000	KESBANG	
		Indikator Sasaran 1. IndeksKepuasanMasyarakat 2. Nilai AKIP	100%	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	260,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
	<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b> - Rata- rata IKM per triwulan - Persentase pemenuha komponen SAKIP - Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat yang di tindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		KESBANG	Tanjung Jabung Barat
		<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b> Jumlah dokumen perencanaan - Ranwal - Renja - Ranc.Akhir Renja - RKA - Jumlah penyampaian laporan kinerja dalam tahun berjalan - Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan dalam satu tahun																	Tanjung Jabung Barat



# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan - Ranwal - Renja - Ranc.Akhir Renja - Jumlah penyampaian laporan kinerja dalam tahun berjalan - Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan dalam satu tahun	100%	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	20,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	20,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	20,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	25,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	25,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	130,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
			Penyusunan Dokumen dan Singkronisasi RKA dan Renja, Renstra OPD.Forum Lintas OPD.	Jenis Dokumen Renstra OPD, Forum Lintas OPD, RKA, Renja, Perjanjian Kinerja, Cascading	100%	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	20,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	20,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	20,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	25,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	25,000,000	2 Jenis Dokumen Masing-masing 10 Buku	130,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
							<b>1,232,530,000</b>		<b>2,578,400,000</b>		<b>2,852,400,000</b>		<b>3,114,400,000</b>		<b>3,743,770,000</b>		<b>15,905,900,000</b>		

Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya	Peningkatan kompetensi Pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas		<b>KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>Penanganan keamanan Lingkungan</b>	<b>90%</b>	<b>114,370,000</b>	<b>91%</b>	<b>202,625,000</b>	<b>92%</b>	<b>250,000,000</b>	<b>93%</b>	<b>250,000,000</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>816,995,000</b>	<b>KESBANG</b>	Tanjung Jabung Barat	
			Koordinasi Kegiatan Orang Asing LSM Asing dan lembaga asing di Daerah	Jumlah Dokumen hasil pendataan terhadap kunjungan dan kegiatan orang asing di 13 kecamatan	84,13%	12 Bulan	59,950,000	4 Dokumen	52,625,000	4 Dokumen	100,000,000	4 Dokumen	100,000,000	0.00%	0.00	0.00%	0.00	12 Dokumen	312,575,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
			Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan penanganan kejadian konflik di Daerah	80%	12 Bulan	54,420,000	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	150,000,000	0.00%	0.00	0.00%	0.00	12 Dokumen	504,420,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
			<b>PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)</b>					<b>120,000,000</b>		<b>150,000,000</b>		<b>150,000,000</b>		<b>150,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>570,000,000</b>	<b>KESBANG</b>	Tanjung Jabung Barat	



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



		Komunita Inteligen Daerah (KOMINDA)	Koordinasi dan Deteksi Dini antar unsur Inteligen dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	90	12 Bulan	120,000,000	13 Kecamatan dan 4 Dokumen Laporan	150,000,000	13 Kecamatan dan 4 Dokumen Laporan	150,000,000	13 Kecamatan dan 4 Dokumen Laporan	150,000,000	0.00%	0.00	0.00%	0.00	39 Kecamatan dan 12 Dokumen Laporan	570,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
						-		300,000,000		300,000,000		300,000,000	-	-	-	-	-	900,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
Meningkatkan kepastian Hukun dan Demokrasi	Peningkatan Peran Partai Politik dalam demokrasi Daerah	PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Indeks Demokrasi dan Pengetahuan Politik Masyarakat	88%	90%	0.00	90%	150,000,000	93%	150,000,000	94%	150,000,000	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	450,000,000	KESBANG	Tanjung Jabung Barat
			Forum Diskusi Politik	Jumlah peserta yang mengikuti Forum diskusi Politik di Daerah	100%	0.00%	0.00	1 Kali 50 Peserta	150,000,000	1 Kali 50 Peserta	150,000,000	1 Kali 50 Peserta	150,000,000	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3 Kali 150 Peserta	450,000,000	KESBANG
						234,370,000		652,625,000		700,000,000		700,000,000		0		0		2,286,995,000		





## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



ntuk melaksanakan Program program tersebut di atas maka berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka Menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah. Oleh karena itu melalui Forum OPD telah disepakati program program dan kegiatan serta jumlah besaran pagu indikatif yang dianggap dapat mengakomodir kegiatan tersebut. Adapun program dan kegiatan yang merupakan hasil kesepakatan dalam Forum OPD adalah sebagai mana tabel berikut :



#### **BAB IV PENUTUP**

Perubahan peraturan dan paradigma di bidang pemerintah dan pembangunan yang dilandasi dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan demokratis, penegakan hukum dan berkeadilan membawa konsekuensi perlunya birokrasi pemerintah yang memiliki perencanaan yang profesional, bersih, efektif, serta makin responsif dan akomodatif terhadap perubahan lingkungan yang berpengaruh pada kinerja.

Sebagai bagian protap dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 adalah merupakan langkah untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang seiring dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Rencana Kerja ini disusun sebagai Pedoman pelaksanaan DPA 2019, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019, dengan rencana pembiayaan sebesar Rp. **1,637,192,046** ( Satu Milyae Enam Eatus Tiga Puluh Tuju Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Puluh Enam Rupian) dan perkiraan maju tahun 2021 sebesar Rp. 6.718.850.000,- ( Enam miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan jumlah Program sebanyak 9 Program, serta 41 Rencana Kegiatan.

KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**Des. R. AZIS MUSLIM, MAP**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680530198810 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
Tahun 2018

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Tahun : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Koordinasi kegiatan orang asing, LSM kenyamanan lingkungan	Termonitornya keberadaan dan kegiatan orang asing, LSM Asing dan Lembaga Asing	80%
Penanganan Konflik Sosial	Meminimalisir terjadinya Konflik	80%
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama	90%
Forum Diskusi Penguatan Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	Terciptanya Masyarakat yang ber wawasan kebangsaan	85%
Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK )	Terwujudnya Pembauran Kemasyarakatan	90%
Bimtek Bela Negara	Tersedianya Kader yang berwawasan Kebangsaan	90%
Komunitas Inteligen Daerah (KOMINDA)	Terselenggaranya Kegiatan Inteligen Daerah	87%
Foum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terdeteksinya secara dini masalah-masalah yang berkaitan dengan Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah (FKDM)	80%
Tim Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Keuangan Papol	Terlaksananya Penyaluran dana bantuan Papol	90%
Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Serap Aspirasi Forum LSM	87%
Pembinaan pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman dan partisipasi masyarakat di bidang Politik	80%
Tim Perkembangan Politik Daerah	Meningkatnya pelaksanaan koordinasi Tim Perkembangan politik daerah dalam rangka pemantauan dan pelaporan	89%
Sosialisasi Pemilu 2019	Terlaksananya Sosialisasi Pemilu Legislatif	13 Kecamatan

Kuala Tungkal, 2018

KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



*[Handwritten signature]*

Drs. R. AZIS MUSLIM, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c  
NIP. 19680530 198510 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
Tahun 2019

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Tahun : 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Bangsa, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	- Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan / perkembangan kelompok radikal	1 %
	- Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan / perkembangan kasus yang bertatar belakang suku ras dan antar golongan	0,5 %
Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antarsuku agama dan golongan	- Persentase penurunan konflik sosial - Persentase penurunan aksi unjuk rasa	90 % 90 %
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial serta pemberdayaan Ormas guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kodusif	- Tingkat keberhasilan pencapaian pertumbuhan konflik terkait kerukunan antar umat beragama. - Persentase Ormas yang berperan secara aktif dalam pembangunan	0,5 % 30 %
Meningkatkan demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	- Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu: - Pilpres 2019 - Pileg Provinsi dan Kabupaten - Persentase penurunan sengketa pemilu	90 % 90 % 90 %

Kuala Tungkal, 2019

KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. R. AZIS MUSLIM, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c  
NIR. 19680530 198510 1 001